

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEMATIAN ATLET KARATE DALAM KEJUARAAN NASIONAL DI MAKASSAR

OLEH

ANDI ZULKIFLI ZAINUDDIN

B 111 07 857

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEMATIAN ATLET KARATE DALAM KEJUARAAN NASIONAL DI MAKASSAR

OLEH:

ANDI ZULKIFLI ZAINUDDIN

B 111 07 857

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEMATIAN ATLET KARATE DALAM KEJUARAAN NASIONAL DI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ZULKIFLI ZAINUDDIN
B 111 07 857

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 2 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ANDI ZULKIFLI ZAINUDDIN

Nomor Induk : **B 111 07 857**

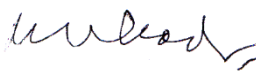
Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEMATIAN
ATLET KARATE DALAM KEJUARAAN NASIONAL
DI MAKASSAR

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian
Akhir Program Studi Sarjana.

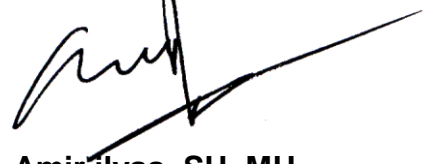
Makassar, Oktober 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.S
NIP . 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Amir Ilyas, SH.,MH.
Nip. 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ANDI ZULKIFLI ZAINUDDIN
Nomor Induk : **B 111 07 857**
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEMATIAN
ATLET KARATE DALAM KEJUARAAN NASIONAL
DI MAKASSAR.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian
Akhir Program Studi Sarjana.

Makassar, Oktober 2012

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
NIP.19630419 198903 1003

ABSTRAK

ANDI ZULKIFLI ZAINUDDIN, B 111 07 857 “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEMATIAN ATLET KARATE DALAM KEJUARAAN NASIONAL DI MAKASSAR”. dibimbing oleh bapak **Muhadar** selaku pembimbing I, dan bapak **Amir Ilyas** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kematian atlet dalam kejuaraan nasional, dan yang kedua adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal.

Penelitian dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar dan FORKI Cab. Makassar dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab kematian atlet dalam kejuaraan nasional, sebagai berikut: Dalam dunia Keolahragaan Nasional khususnya dalam pertandingan karate, ada beberapa aturan/prosedural yang harus dipenuhi, Jika aturan/prosedural tersebut tidak dijalankan maka dapat menjadi faktor yang mengancam keselamatan para atlet yang bertanding, bahkan dapat berujung pada kematian. Aturan-aturan tersebut adalah : aturan *Kumite*, durasi pertandingan, aturan lapangan, aturan perwasitan, peralatan dalam pertandingan. (2) upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal adalah Pemerintah berusaha meramu aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap atlet-atlet karate dan dunia keolahragaan. Aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan keolahragaan yang saling terkait, undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak. Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, demi mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang suci.

Dalam masa studi sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang Penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat melalui semua itu dan pada hari ini untuk merai gelar S.H. dibelakang nama Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda **Andi Zainuddin, S.H.,M.H.** dan ibunda **Andi Tanawali** tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah demi Penulis agar dapat terus melanjutkan studi. Apa yang Penulis dapatkan hari ini

belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal di mana Penulis harus membuktikan kepada kedua orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari Penulis yang tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga bagian dari motivasi dan semangat Penulis.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkata banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A. Paturusi Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Marcel Hendrapaty,S.H.,M.H.selaku Penasihat akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
5. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah

memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

6. Semua Pihak yang membantu Penulis dalam masa penelitian.
7. Kepada saudara-saudariku di IMHB yang selalu mengajarkan tentang “*Getteng, Lempu, Tettong Ri Ada Tongeng*. Terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan, arti persahabatan dan arti persaudaraan.
8. Kepada Pajaruiddin S.H., Andi Wahyu Iskandar, S.H., Chandra Syarlin S.H., Andi Richa Tristanto S.H., Andi Zulfikar Rosani S.H., Musirwan, S.H., Jawadil S.H., Rahmat Rukhman S.H, dan yang paling khusus kepada Adinda Yuliani S.H., yang senantiasa mendoakan,yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih begitu banyak kekurangan, olehnya itu dengan senang hati Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini.

WABILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Kriminologi dan ruang lingkupnya	6
B. Karate	11
1. Sejarah Karate Dunia	11
2. Karate di Indonesia.....	13
3. Falsafah Karate	15
C. Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	17
1. Kesengajaan.....	17
2. Kelalaian.....	25

3. Pertanggungjawaban Pidana	27
D. Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf	29
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	36
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN	54
A. Faktor Yang Menyebabkan Kematian Atlet Saat Pertandingan Karate	54
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Yang meninggal Saat Pertandingan Karate.....	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengertian umum sebutan Karate nampak lebih akrab pada masyarakat awam daripada sebutan *Karate-Do*. Menurut frasa yang tepat, dalam disiplin awal keberadaannya seni bela diri ini disebut *Karate-Do*. Penyebutan karate-do memberi pendalaman pengertian yang ditafsirkan sebaai keseluruhan aspek supremasi “dunia perkaratean” secara hakiki, mulai dari unsur filosofis, seni, olahraga, beladiri, kesehatan dan multi aktivitas lainnya yang berkaitan secara totalitas mengenai keberadaan Karate. Do dalam kata karate-do berarti cara atau pedoman, kemudian diindikasikan sebagai tata tertib dan filosofis dari karate yang dikorelasikan dengan spiritualitas moral.

Di negara Jepang, terdapat organisasi yang mewadahi olahraga Karate di seluruh Jepang, yang bernama *Japan Karate-Do Federation* (JKF), yakni menyebutkan kata *Karate-Do*. Kata Karate merupakan kombinasi dari dua karakter (kata) jepang, yaitu terdiri dari dua kata kanji : pertama adalah *Kara* artinya kosong, dan yang kedua adalah *Te* yang artinya Tangan, jika digabungkan akan memiliki arti sebagai tangan kosong, dan jika ditambah akhiran *Do* yang berarti cara, maka Karate-Do berarti cara hidup yang lebih dari sekedar mempertahankan diri. Yang hakikatnya merupakan beladiri tangan kosong, yang memberi keleluasaan pada setiap orang untuk menggunakan kepala tinju atau mempertahankan diri dengan tangan kosong.

Dalam perkembangan karate di Jepang, pada masa itu pengaruh budaya Cina sedang marak. Banyak ahli beladiri yang mengadakan perjalanan ke Cina untuk belajar Tinju Cina. Pengetahuan mereka yang baru, mengubah seni beladiri yang sudah ada yang disebut Okinawate, dengfan mengeliminasi hal yang buruk dan memasukkan yang baik kedalamnya, yang menjadikannya sebuah seni beladiri yang lebih baik.

Dalam lingkup budaya Cina, pada awalnya seni beladiri disebut *Tote* yang berarti “Tangan Cina”.

Karate yang diperkenalkan sekarang sesungguhnya merupakan rangkaian panjang dalam sejarah seni beladiri Jepang seperti Kempo, Jujutsu, Judo, dan sebagainya. Pada awalnya, Karate diciptakan sarat dengan nuansa filosofis, jalan hidup, atau pegangan hidup, untuk tujuan yang idealistis, yakni menanggulangi kejahatan, mengatasi kekerasan, tindak pidana kriminal dan pengembangan aspek humanis lainnya. Namun, bila diamati seksama pada perkembangannya sekarang, cenderung menjadi mekanistik teknis, lebih dekat dengan unsur budaya “pop” kontemporer daripada pendalaman filosofis yang dikenalnya sebagai karate umum.

Pada dasarnya Karate bukan sekedar memenuhi kebutuhan unsur olahraga semata, tetapi memiliki cakupan nuansa amat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti filosofi, seni budaya, intelektual, dan integritas kepribadian.

Pada generasi berikutnya, mempelajari Karate nampak lebih mengarah pada sikap pragmatisme untuk tujuan praktis yaitu upaya

memenangkan sebuah kompetisi pertandingan dan perebutan gelar juara tanding, sehingga aspek pengembangan teknis keolahragaan kompetisi lebih menonjol, lebih dekat tampilan gaya hidup. Tidak terlalu salah, sebab pada akhirnya kompetisi secara sehat itu juga merupakan bagian dari idealisme, seperti mengandung unsur-unsur sportivitas, berjiwa kesatria, bersikap elegan, dan sebagainya.

Pada tahap awal, bentuk asli Karate mirip pertarungan tangan atau tapak yang dikembangkan di Okinawa yang disebut *Te* atau tangan. Pada tingkat selanjutnya, Karate hanya mempertandingkan peragaan jurus *Kata*, dan bukan pertarungan *Kumite*. Karena pada awalnya memang terdapat pertimbangan bijak yang menghawatirkan kemungkinan terjadinya cedera bila Karate dipertandingkan, maka setelah dirumuskan sistem dan peraturan pertandingan dalam rangka pesta olahraga, Karate dianggap layak dipertandingkan.

Untuk *kumite* aliran olahraga, lebih dikenal dengan *Kumite Shiai* (*Kumite Pertandingan*). Karateka yang bertanding diharuskan untuk dapat menjaga jarak pukulannya agar tidak mencederai lawan tanding. *Kumite* dibagi atas *kumite* perorangan dengan pembagian kelas berdasarkan berat badan, dan *kumite* beregu tanpa pembagian kelas berat badan. Untuk *kumite* beregu tersebut hanya dikhususkan untuk putera.

Sistem pertandingan yang dipakai mengacu pada peraturan WUKO adalah *reperchance* atau babak kesempatan kembali kepada atlet yang pernah dikalahkan oleh sang juara. Alokasi waktu pertandingan dilakukan dalam satu babak dengan waktu 2-3 menit bersih, dan 1 babak

perpanjangan kalau terjadi seri. Kecuali pertandingan beregu tidak ada waktu perpanjangan, apabila masih pada babak perpanjangan, umumnya karena mengalami nilai seri, maka akan diadakan penilaian ulang terhadap karateka yang lebih ofensif dan agresif, ditetapkan sebagai pemenang.

Karena Karate telah dipertandingkan sebagai salah satu cabang olah raga, kini timbul pertanyaan, bahwa bagaimana kemudian ketika dalam pertandingan Kumite tersebut ada atlet yang meninggal dilihat dari aspek hukum?.

Berdasar dari pertanyaan di atas, Penulis akan mencoba mengkaji dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kematian Atlet Karate Dalam Kejuaraan Nasional Di Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadi kematian pada atlet yang bertanding?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal pada saat bertanding?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang atlet meninggal dalam pertandingan kumite

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal pada saat bertanding

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai aturan hukum tentang dunia olahraga, yang dalam hal ini lebih kepada olah raga Karate
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap olahraga beladiri di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi Dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologi kata kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) berasal dari “kata *Crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan”.

Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu:

mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut W.A. Bonger (1982:6), memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Melalui definisi ini, Bonger (Hari Saherodji, 1980:9), membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisikanya.
- c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun Tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala

yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal di mana penyelidikan psikologi kriminal/sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

- d. *Psyche* dan *Neure-pathologi* kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihindangi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. Penologi: ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f. Kriminalistik : ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

Moeljatno, (1986:3) mengemukakan bahwa kriminologi adalah “sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.

Sedangkan menurut Wilhelm Sauer (L. Moeljatno, 1986:3) bahwa:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu :1. Perbuatan individu (Tat und Tater), 2. Perbuatan/kejahatan.”

Van Bemmelen (L. Moeljatno, 1986:3) mengatakan bahwa:

Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Menurut ahli U.S.A: Thorsten Sellin (L. Moeljatno, 1986:3), “istilah *Criminology* di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangnya (*treatment*)”.

Kita melihat pendapat ahli U.S.A. lain Sutherland (L.Moeljatno, 1986:4) yang beranggapan bahwa:

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial). Ilmu meliputi:

1. Cara proses membuat undang-undang,
2. Pelanggaran terhadap undang-undang dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran–pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.

Menurut Moeljatno, (1986:6) menyatakan bahwa, “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Dengan kata lain, Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi

merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum karena berdasarkan simposium *International Society of Criminology*, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum.

Sesuai yang di jelaskan oleh R. Soesilo (1985:12) Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang(selanjutnya disebut UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001:15).

Kriminolog Amerika, Kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian:

1. *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum
2. Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan
3. Penologi: ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah suatu gejala social, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

B. Karate

1. Sejarah Karate Dunia

Menurut legenda kuno, kehadiran karate berproses secara evolusi, berawal dari ribuan tahun yang lalu. Legenda ini selalu dipakai untuk dijadikan referensi mengenai asal-usul hampir semua beladiri yang diyakini bersumber dari negeri Cina, ternyata berinduk semang dari India.

Setelah Sidharta Gautama pendiri budha wafat, pengikutnya mendapat amanah untuk mengembangkan agama budha ke seluruh dunia. Namun karena sulitnya medan yang dilalui, maka para pendeta diberikan bekal ilmu beladiri. Setelah dimodifikasi sesuai kebutuhan lokal, atau beradaptasi dengan budaya setempat, maka berubahlah nama beladiri itu menjadi bermacam-macam nama lain yang melahirkan berbagai aliran ilmu beladiri di dunia.

Sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-6 masehi, agama budha memasuki dataran cina melalui jalan darat, yang sering disebut sebagai "jalur sutra".

Menurut pengamatan sejarah, induk semang Karate diperkirakan dari India. Keberadaan Karate mulai dikenal sebagai akibat pengaruh dari penyebaran agama budha yang dibawa oleh Daruma Daishi dai India

tersebut. Ia mengembara meninggalkan India menuju utara, melintasi gunung Himalaya yang berhutang ganas. Suatu saat sampailah ia di kerajaan Liang di bawah kekuasaan Kaisar Wu di Cina. Ia tinggal di Kuil Shaolin, lalu menyebarkan Zen Buddhisme atau menurut istilahnya meluruskan ajaran-ajaran agama budha yang menyimpang dari ajaran aslinya.

Selama Guru Budha melakukan meditasi di Biara Shorinji, Mt-Sung, Provinsi Henan Cina, diciptakanlah seni beladiri tersebut. Dalam kapasitas sebagai pangeran, Daruma Daishi memiliki keahlian perang yang menjadi salah satu pendidikan dasarnya, hampir mirip dengan *Sakyamuni*. Kalau kita perhatikan, dalam agama Budha terdapat pelajaran yang bertujuan menguatkan tubuh manusia yang disebut dengan Yoga.

Karena ada perbedaan pandangan dengan kaisar Wu mengenai persepsi ajaran Budha ini, sehingga Bodhidarma memilih megasingkan diri ke Biara Shaolin Tsu di pegunungan Sung bagian selatan Loyang ibukota Kerajaan Wei. Di tempat ini beliau melanjutkan pengajarannya dalam agama Budha yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya aliran baru Sekte *Zen*. Zen berarti melihat diri sendiri dan sasarannya adalah upaya melepaskan diri dari segala keterikatan hidup manusia yang mengakibatkan manusia menjadi lemah tidak berdaya.

Menurut sejarah, biara ini kemudian terkenal sebagai pusat pengembangan pelajaran beladiri di dataran Cina, hingga sekarang.

Dalam sebuah referensi lain mengatakan bahwa keberadaan Karate merupakan pengembangan dari seni beladiri Tinju Cina (*China*

Boxing) yang diciptakan oleh Dharma, Guru Budha yang agung. Karate lahir dari sebuah proses panjang yang berawal dari meletusnya perang Boxer di daratan Cina pada tahun 1900-1901. Perang tersebut lahir sebagai reaksi dari perlawanan rakyat Cina yang menentang kedatangan Kolonialisme Barat.

Karena kalah dalam peralatan perang, maka banyak rakyat Cina yang menjadi korban, dan yang selamat, malrikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Bikshu-bikshu yang sempat meloloskan diri ke arah timur dan selatan, kemudian mengajarkan beladiri kepada pedagang-pedagang dari Okinawa, Taiwan, dan Muangthai. Mereka yang lari ke Muangthai berhasil mengembangkan beladiri yang disebut *Thai Boxing*. Sementara mereka yang lari ke Okinawa, berakulturasi dengan budaya beladiri setempat melahirkan *Tote*.

Sementara itu, menurut versi lain menyebutkan bahwa Karate berasal dari Kempo yang diciptakan oleh Bodhidharma, Guru Budha yang agung, oleh karena itu gengerasi selanjutnya menyebut beladiri tersebut dengan nama *Shorinji Kempo*.

Selain versi di atas, masih ada versi lain yang menceritakan tentang asal dari Karate, diantaranya menyebutkan bahwa Karate murni berasal dari ilmu beladiri kuno di Okinawa yang diberi nama *Okinawa-Te*, yang merupakan beladiri asli setempat yang telah mengalami pergeseran berabad-abad lamanya.

Pengaruh Ilmu beladiri dari Cina ini dengan cepat menjalar ke seluruh kepulauan Okinawa. Melalui ketekunan berlatih, rakyat Okinawa

berhasil mengembangkan sejenis gaya dan teknik berkelahi baru yang bahkan nampak lebih indah dari sumber aslinya.

2. Karate Di Indonesia

Pada awal tahun 1960-an pemerintah Indonesia berhasil mengklaim pemerintah Jepang untuk membayar rampasan perang, yakni sebagai kompensasi atas peristiwa masa lalu ketika Jepang pernah menjajah bangsa Indonesia tahun 1942-1945, pada saat terjadi Perang Dunia II di Asia. Rampasan perang itu kemudian dibayarkan dalam berbagai bentuk, antara lain berupa pembangunan gedung-gedung besar di jalan Thamrin Jakarta, seperti hotel Indonesia, Toserba Sarinah, Gedung Nusantara, dan masih banyak lagi, termasuk pemberian beasiswa bagi para mahasiswa Indonesia untuk belajar beladiri di Jepang.

Sejak saat itu, para pemuda Indonesia mulai berbondong-bondong dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk studi ke Jepang dalam rangka realisasi rampasan perang. Di Jepang, selain studi umum di berbagai bidang ilmu, para pemuda tersebut juga berkesempatan menimba ilmu beladiri Jepang, salah satunya adalah Karate. Mereka berlatih Karate dari berbagai aliran seperti Shotokan, Gojukei, Wadokai dan lainnya. Tetapi terbanyak adalah aliran Shotokan, karena Shotokan pada waktu itu nampak mendominasi komunitas Karate di Jepang. Shotokan merupakan salah satu dari empat aliran Karate terbesar di Jepang, selain Wado, Goju, dan Shito yang masing-masing beranak cucu menjadi aliran-aliran kecil. Aliran Shotokan dipopulerkan Funakoshi dan diturunkan kepada

Nakayama yang menggelar kejuaraan Karate pertama di Jepang pada tahun 1957.

Dalam sejarah Indonesia tercatat beberapa nama yang dianggap berjasa dalam mengembangkan Karate di Indonesia pada tahun 1963, diantaranya adalah Drs. Baud AD Adikusumo, H. Muchtar MR, Karyanto Djojonegoro dan lain-lain(Dodi Rudiyanto, 2010). Mereka kemudian mendirikan *dojo* di Jakarta dengan memperkenalkan Karate aliran Shotokon di Indonesia.

Setelah generasi pertama muncul, muncul generasi-generasi berikutnya, disusul berdatangan para mahasiswa Indonesia lainnya dari Jepang yang telah menyelesaikan studinya di Jepang, dalam sejarah tercatat nama-nama yang berjasa dalam mengembangkan aliran Karate di Indonesia, seperti Drs. Sabeth Mukhsin dari aliran Shotokon pendiri *Institut Karate-Do Indonesia* (INKAI) dan *Federasi Karate Tradisional Indonesia* (FKTI), Dr. Anton Lesiangi dari aliran Shotokon adalah pendiri *Lembaga Karate-Do Indonesia* (LEMKARI), mereka tercatat sebagai pelopor perkembangan seni beladiri Karate di Indonesia.

Selain Shotokon, Indonesia juga memiliki perguruan dari aliran lain seperti *Wadokai*, dan *Kushin-ryu Matsuzaki Karate-Do* (KKI) yang didirikan oleh Matsuyaki Horyu dan beberapa lainnya membawa aliran Goju-ryu. Setyo Haryono kemudian mendirikan Gojukai. Dan masih banyak lagi perguruan-perguruan lainnya.

Selain aliran-aliran yang bersumber langsung dari Jepang, berkembang pula beberapa aliran Karate di Indonesia yang dikembangkan oleh putra-putra Indonesia sendiri dari berbagai sumber.

PORKI yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1964 oleh beberapa tokoh pendiri, mengalami perpecahan pada Kongres III, mereka yang memecahkan diri lalu membentuk perguruan, yaitu Inkai, Inkado dan Lemkari.

PORKI kemudian berubah nama menjadi FORKI (Federasi Karatedo Indonesia), menjadi tombak bagi seluruh perguruan Karate di Indonesia yang kemudian diakui oleh KONI (Komite Olahraga Nasional).

Kemudian FORKI menjadi perwakilan WKF (*World Karate Federation*) untuk Indonesia, FORKI bertujuan untuk mengembangkan Karate sebagai olahraga seni dan beladiri untuk memupuk kepribadian yang luhur dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia, membantu usaha memajukan bangsa Indonesia yang sehat, kuat, dan berjiwa besar dalam rangka ketahanan nasional dan pembangunan pada umumnya, serta membina persatuan sesama aliran olahraga Karate-Do seluruh Indonesia.

3. Falsafah Karate

Dalam falsafah Karate dikenal sebutan *Rakka* (Dodi Rudianto, 2010:38), dalam arti harfiahnya adalah bunga yang berguguran, digunakan sebagai filosofi beladiri dalam konsep pertahanan Karate. Dimana dalam tiap penerapan teknik pertahanan perlu menggunakan tenaga optimal agar

tiap teknik sudah memadai melakukakn gerakan beladiri, seperti bila teknik tersebut dilancarkan ke sasaran utama, maka semua bunga pada sasaran tersebut akan jatuh berguguran. Misalnya jika datang serangan yang mengarah ke muka, maka dapat digunakan teknik menangkis arah atas. Sekiranya tangkisan itu cukup kuat dan mantap, ia boleh melumpuhkan tangan penyerang itu. Dengan demikian tidak perlu membalas seranganpun sudah cukup melumpuhkan lawan secara total.

Guru Besar Karate Mas Oyama(Dody Rudianto, 2010:39) mengatakan bahwa “Prinsip bertarungnya sangat sederhana, bila ia memukulmu maka kamu hancur. Bila kamu menangkis dengan tangan, maka tanganmu akan hancur, bila kamu tidak menangkis maka badanmu yang akan hancur”.

Makna tersebut di atas juga terkandung dalam *Kara* pada Karate. Akhirnya, pada arah yang paling mendasar, isi dari alam semesta adalah kekosongan (*kara*) dan kekosongan adalah isi itu sendiri. Tidak berlebihan dikatakan faham asli Karate adalah menjadi satu dengan semua dasar seni beladiri. “Isi adalah kekosongan, kekosongan adalah isi itu sendiri”(Dody Rudianto, 2010:39).

Apabila filosofi Karate dipraktikkan maka akan lahir para Karateka yang disiplin, jujur, percaya diri, sehat dan kuat. Hal ini sangat relevan bagi profil prajurit yang harus tanggap.

Filosofi yang harus difahami dan dimengerti oleh para *Sempai* maupun *Kohai*, yakni agar mereka mencapai jalan yang sebenarnya. Untuk mencapai jalan yang sebenarnya, para Karateka harus memiliki

sikap saling menghormati, berfikir positif, berkonsentrasi penuh, melekat pada ajaran, senantiasa berhati lembut, dan senantiasa memiliki inisiatif, serta rajin.

Karate bagai cermin suci memantulkan bayangan tanpa cacat. Jadi dalam mempelajari Karate, orang haruslah membersihkan diri dari kesombongan dan menjauhkan diri dari fikiran kotor, hanya dengan fikiran dan batin yang jernih, seseorang Karateka dapat memahami apa yang diterimanya sebagai hakikat kehidupan menuju kemuliaan.

C. Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis, tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggungjawabannya tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar. *Schuld* (kesalahan) tidak

dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat dipidana".

Lebih lanjut Prof. Moeljatno (1970:217) menjelaskan bahwa :

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Apa sebenarnya arti kesalahan itu sendiri, berikut Penulis akan menguraikannya dari pandangan beberapa ahli sebagai berikut :

- Menurut Jonkers (Bambang Poernomo, 1992:136) bahwa,
Dalam keterangan tentang *Schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu:
 1. Selain kesengajaan atau kealpaan
 2. Meliputi juga sifat melawan hukum
 3. Dan kemampuan bertanggungjawab
- Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 1992:136) bahwa
"pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum".
- Vos (Bambang Poernomo, 1992:136) memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan,
- c. Tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si Pembuat atas perbuatannya

Dari pengertian tentang Kesalahan di atas maka dalam arti luas, kesalahan terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Sengaja
- 2) Kelalaian
- 3) Pertanggungjawaban pidana

Di bawah ini akan dikemukakan secara spesifik tentang ketiga bagian kesalahan tersebut di atas.

1) Kesengajaan

Pada dasarnya, dikenal tiga bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (Bambang Poernomo, 1992:159), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn, of noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini, baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana tersebut, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sedangkan kesengajaan dengan

sadar kemungkinan, adalah keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi ini.

Menurut Van Hattum (A.z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:143)

Opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *Oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *Willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).

Sementara itu, menurut Von Hippel (Bambang Poernomo, 1992:157) mengatakan bahwa:

Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Sedangkan menurut Pompe (A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:143) bahwa

Apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas pada "sengaja (*opzet*). Setiap maksud(*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*).

Moeljatno berbeda pendapat dengan para ahli di atas, menurutnya (1970:252),

Kesengajaan hanya ada dua yaitu, sengaja akan kepastian dan sengaja akan kemungkinan, karena alasan telah menganut teori pengetahuan maka terhadap akibat/keadaan yang menyertai di situ terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada.

Bagi penganut teori pengetahuan, memang tidak lagi melihat peranan kehendak, sehingga alam pikirannya berbeda dengan penganut teori kehendak yang masih melihat peranan kehendak karena setiap terdakwa akan tetap berlainan manakala seseorang melakukan kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kepastian.

Apa yang dikatakan oleh Moeljatno adalah benar, ketika kehendak seseorang sudah dikandung dalam pengetahuan atau apa yang dikehendaki dengan sendirinya juga diinsyafi, dan kesengajaan dihubungkan baik terhadap kelakuan maupun akibat lain yang juga turut timbul dalam kejadian yang nyata. Namun sebaliknya suatu peristiwa yang dilarang oleh hukum pidana dapat sungguh-sungguh terjadi bahwa seseorang melepaskan tembakan pistol dengan tujuan tertentu untuk menimbulkan akibat matinya orang yang dimaksudkan, sehingga akibat mati adalah kesengajaan sebagai maksud dimana kehendak searah dengan maksud dan tujuan beserta dengan dorongan motif yang ada.

Di dalam literatur hukum pidana, masih ada beberapa jenis kesengajaan, yaitu (Bambang Poernomo, 1992:163):

- a. *Dolus Generalis*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada orang banyak atau kesengajaan tidak ditujukan kepada orang banyak melainkan kepada seseorang akan tetapi untuk mencapai tujuannya diperlukan lebih banyak perbuatan yang dilakukan, contoh: melempar bom ditengah-tengah orang yang sedang berkerumun.
- b. *Dolus Indirectus*, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang terbit akibat lain yang tidak

dikehendaki. Misalnya, mendorong seorang wanita hamil dari suatu tangga sehingga jatuh dengan mengakibatkan gugurnya kandungan. Bangunan *Dolus* yang demikian ini sudah banyak diikuti, seperti halnya sengaja melakukan penganiayaan tetapi akibat perbuatannya si korban menjadi mati.

- c. *Dolus Determinatus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada tujuan tertentu, baik terhadap perbuatannya maupun pada akibat perbuatannya. Apabila tujuan yang dimaksudkan hanya semata-mata dipandang sebagai objek, maka bangunan *Dolus Determinatus* tidak mempunyai arti, sengaja melakukan perbuatan pidana tanpa mempunyai objek tidaklah mempunyai arti karena tidak pernah ada.
- d. *Dolus Indeterminatus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang atau tidak memperdulikan siapa/apa saja yang menjadi korban. Misalnya menuangkan racun ke dalam mata air sungai dimana tempat itu dipakai untuk keperluan air minum bagi umum.
- e. *Dolus Alternativus*, yaitu kesengajaan dari pembuat menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain, jadi memilih di antara dua akibat. Misalnya si pembuat bertujuan untuk membunuh terhadap A atau B saja, dan bukan untuk membunuh orang sebanyak mungkin seperti teror yang disebut kesengajaan umum/*generalis*.
- f. *Dolus Premeditatus* dan *Dolus Repentinus*, yaitu yang pertama merupakan kesengajaan yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak terlebih dahulu dalam hati yang tenang, sedangkan yang kedua merupakan kesengajaan dengan sekonyong-konyong. Perbedaan antara kedua bentuk kesengajaan itu terletak pada pemberatan pidananya.

Kesengajaan dapat terjadi karena salah paham atau kekeliruan yang disebut dengan *Dwaling*. Seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan.

Mengenai *Dwaling*, dalam hukum pidana dikenal beberapa bentuk, diantaranya adalah:

a) *Feitelijke Dwaling*

Jika kekeliruan itu ternyata tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur dari perbuatan pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Misalnya: seorang mengira dengan jalan membayar suatu barang sudah menjadi miliknya, dengan kemudian atas barang tersebut dimodifikasi sehingga tidak seperti lagi aslinya. Perbuatan tersebut tidak dapat dituntut Pasal 406 KUHP.

b) *Rechtsdwaling*

Melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Dalam *Rechtsdwaling* ini, dapat dibedakan menjadi, kekeliruan yang dapat dimengerti dan kekeliruan yang tidak dapat dimengerti

c) *Error in Persona*

Kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana. Misalnya, A hendak membunuh B, oleh karena belum kenal dekat ternyata yang dikira B yang dibunuh itu adalah C. Perbuatan A tersebut tidak dapat melepaskan dari tuntutan hukum pidana karena kekeliruan.

d) *Error in Objecto*

Kekeliruan mengenai objek yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana. Misalnya, si A melepaskan tembakan kepada sesuatu sasaran yang dikiranya seekor rusa, akan tetapi ternyata orang yang sedang bergerak diantara pepohonan, orang tersebut luka

para dan akhirnya meninggal. Dalam kasus tersebut Pasal 335 KUHP tidak dilanggar, melainkan Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Penempatan dan perumusan unsur kesengajaan maupun istilah lain yang sama dalam delik menimbulkan beberapa masalah berhubung adanya pandangan-pandangan setelah mengetahui kenyataan bahwa undang-undang dibentuk memuat rumusan kalimat yang hanya pokok saja ataupun adanya kesukaran rangkaian tata bahasa.

Sudah menjadi sistem dalam KUHP bahwa dalam kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali apabila ditentukan lain, terutama dalam hal kejahatan karena kealpaan. Dalam suatu rumusan delik, yang oleh undang-undang terdapat unsur *Opzet*, berarti unsur lain yang ditempatkan di belakang *Opzet* diliputi oleh *Opzet*.

Perbuatan dengan sengaja tidak hanya terdapat di dalam undang-undang saja, melainkan dalam kehidupan sehari-hari juga terdapat unsur kesengajaan. Oleh karena itu harus diberikan batas yang tegas kesengajaan di dalam hukum pidana.

Sejak pandangan lama ditinggalkan yaitu kesengajaan haruslah *Dolus Malus* (kesengajaan jahat), bahwa terdakwa untuk dapat dipidana karena perilaku kejahatan dan harus mengetahui perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum, maka kemudian beralih kepada pandangan *opzet is een klerloos begrip* artinya untuk dapat dipersalahkan terdakwa cukup dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja saja, tanpa perlu mengetahui sifat melawan hukumnya.

2) Kelalaian

Telah diuraikan sebelumnya bahwa kejahatan pada umumnya dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dalam beberapa hal kejahatan dapat dilakukan karena kealpaan atau kelalaian. Dalam berbagai literatur hukum pidana, kealpaan dianggap sebagai lawan dari kesengajaan.

Van Hamel (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:159) membagi *culpa* atas dua jenis:

1. Kurang melihat kedepan yang perlu
2. Kurang hati-hati yang perlu.

Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada.

Selain Van Hamel, Vos juga membuat pembagian atas *culpa* tersebut yaitu yang pertama bahwa terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi. Dan yang kedua keidakhati-hatian atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian.

Menurut Vos (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:161) bahwa

dapat melihat kedepan suatu akibat merupakan syarat subyektif (pembuat harus dapat melihat kedepan), misalnya seorang anak kecil memindahkan wisel rel kereta api sehingga kereta api keluar rel, tidaklah ia bersalah jika ia tidak tahu apakah wisel kereta api itu. Tetapi culpa itu ada pula segi obyektifnya, yaitu sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan pembuat dapat melihat ke depan akibatnya jika seharusnya ia telah perkirakan.

Sebenarnya ada batas yang sangat tipis antara kelalaian yang disadari dan sengaja kemungkinan. Persamaan dari keduanya adalah pembuat dapat melihat ke depan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Sedangkan perbedaannya adalah pada kelalaian, yang disadari pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu. ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindari akibatnya.

Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh huku, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan, yaitu harus terjadi perbuatan pidana, dan harus ada kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa alasan pemaaf.

Apabila dalam suatu peristiwa yang kongkret terdapat dua orang melakukan culpa dalam suatu peristiwa sama kepada masing-masing pembuat culpa itu harus dinilai berhubung kausal atas akibat kerugian/bahaya yang terjadi, sifat melawan hukum perbuatan, dan atau tidaknya kesalahan pada diri pembuat. Oleh karena itu sifat

kesalahan dalam hukum pidana bersifat subjektif yang ditentukan terhadap setiap pembuat delik secara person, demikian pula sifat kesalahan dalam culpa tidak dapat hapus karena adanya kesalahan pada orang lain.

Dalam rumusan undang-undang, delik kelalaian ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kerunghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatannya dapat

dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum.

Menurut Teguh Prasetyo (2010:149) bahwa unsur dapat dipertanggungjawabkan adalah Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:

- Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya atau nilai akibat perbuatannya
- Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
- Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.

Menurut Van Hamel (Bambang Poernomo, 1992:144) bahwa Ada tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu:

- Bahwa orang itu mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Inti dari kemampuan bertanggungjawab tersebut berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. Arti kemampuan bertanggung jawab banyak digantungkan kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya membuat rumusan yang tepat dalam undang-undang.

Dalam KUHP, dianut cara gabungan dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu disamping menyatakan keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena

penyakit, dalam keadaan yang demikian belum tentu lepas dari pembedaan, melainkan harus dinilai bahwa berhubungan dengan keadaan jiwa itu menyebabkan perbuatannya tak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat dipidana.

D. Alasan Pembenaar Dan Alasan Pemaaf.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapusan pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapusan pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapusan penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP.

Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda).

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembeda dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh (1983:125) bahwa :

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan pembeda. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepenuhnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepenuhnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidanya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan.

Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 57), yaitu :

- a. Asas Subsidiaritas;
Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
- b. Asas Proporsionalitas;
Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.

c. Asas "*culpa in causa*".

Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.

1. Jenis-jenis alasan pembenar

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah :

a. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 60) "apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar".

Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu Perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 61) ;

- a. tidak ada jalan lain;
- b. kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

Contohnya ; seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong seorang anak kecil yang terhanyut, sementara di sungai tersebut terdapat tulisan dilarang berenang.

- b. Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 55), yaitu :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.

- c. Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam Pasal 50 KUHP;

Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan

ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

Contohnya; seorang juru sita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan, dimana pada dasarnya menyimpan prabot di jalan adalah dilarang, namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana.

- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam Pasal 51 KUHP.

2. Jenis-jenis alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan.

Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa.

Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya.

2. Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 61), daya paksa adalah “setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”.

Contoh : sebuah kapal tenggelam, ada dua penumpang yang berpegang pada papan yang sama, dimana papan tersebut hanya kuat menahan 1 orang. Karena takut akan mati tenggelam, maka salah seorang mendorong yang lainnya.

Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil.

Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 59).

Yaitu :

- a. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.

Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Bantahan tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.

- b. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

a. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi

hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran UU tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

b. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi- konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Darma Weda, 1996:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada adanya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab,

untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai Boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

c. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

d. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi) berpendapat bahwa, kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

e. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu:

- i. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- ii. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- iii. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- iv. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- v. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* (*Le lois de l'imitation*).

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring

menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :
“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

2) Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3) Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.

4) Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat

tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

f. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa “Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

g. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena

faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

h. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penaggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitasi nary pidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal

ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan ke jalan yang benar, di lain pihak *recidivisme* yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaannya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah *residivis* dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-

kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali ke dalam masyarakat.

E. Glueck dan Sheldon (Soedjono, 1970:54) berpendapat bahwa "kegiatan orang di dalam kejahatan dipengaruhi oleh tahap-tahap usia di dalam hidupnya".

Betapa pelik dan kompleksnya usaha menanggulangi kejahatan, sehingga penting sekali pelaksanaan *crime prevention* dengan metode-metode tertentu yang kiranya dapat diterapkan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Sutherland (Soedjono, 1970:55) mengetengahkan dua metode yaitu:

1. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah recidivist (kejahatan ulangan).

Metode reformasi di bidang penanggulangan kejahatan.

Salah satu sebab dari pada recidivist adalah karena adanya kelemahan dan teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidak sanggupan untuk mengembangkan teori-teori Baru karena kurangnya para petugas.

Dalam hal ini Sutherland akan menerangkan uraian-uraian pada teori reformasi dan dasar-dasar politis teknisnya sebagai berikut:

a. Metode reformasi dinamik

Hingga kini hampir semua bentuk-bentuk reformasi adalah metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaannya yang tidak baik. Ahli-ahli *psychology* dan sosiologi menganggap cara ini sudah usang.

Meski begitu sumbangan menurut cara-cara lama ini tidak dapat kita abaikan. Teori kiasik yang menganggap penyempurnaan reformasi adalah dengan jalan memberikan hukuman yang cukup berat. Cara ini memperlihatkan teori *hedonistik* yang nyata dan berpegang pada pendapat publik. Kini ditinggalkan oleh

psychology dan sosiologi karena hukuman yang dijatuhkan pada penjara semata-mata mustahil akan merubah kejahatan itu sendiri.

Metode ini adalah reformasi klinis dimana penjahat dimasukkan kedalam penjara, dipecilkan seorang did untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukan agar supaya menginsafi kesalahan dan menimbulkan rasa sesal dan tobat.

b. Metode reformasi klinis

Pengaruh-pengaruh politik pembedaan perorangan terhadap penjahat dan pelanggar tidaklah selamanya menggunakan teknis yang spesifik ataupun teori reformasi. Metode ini berpandangan bahwa kondisi-kondisi individual yang menyebabkan kejahatan karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri. Kejadian ditafsirkan sebagai gejala kecacatan dan kekacauan individu. Ditekankan pada masalah biologisnya tanpa memperhatikan faktor-faktor kelompok si pelanggar. Tapi metode klinis lebih dikenal dalam pandangan, bahwa kelainan individu terletak pada ketidakstabilan psychologisnya dan bukan pada segi biologisnya. Metode ini mendasarkan pada *psichiatri* kriminal individu.

c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi

Baru-baru ini ahli sosiologi psychology menemukan bahwa sifat-sifat alamiah individu sudah mulai disempurnakan dengan teori-teori alternatif yang digunakan sebagai dasar penelitian dan perlakuan Para penjahat.

Individu dipandang sebagai kehendak situasi dan bukan atas kehendak tingkah laku. Tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya.

d. Profesional service

1. Metode prevensi dalam penanggulangan kejahatan

2. Metode reformasi seperti halnya metode penghukuman, tidaklah memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengurangi kejahatan.

Kedua metode ini sering gagal di dalam memperbaiki penjahat yang sudah pernah karena berasal dari situasi masyarakat, lingkungannya dimana kejahatan berkembang dengan subur. Juga penghukuman tidaklah

mempunyai daya terhadap kejahatan-kejahatan yang belum dilaporkan ke pengadilan ataupun sikap mendekati kejahatan seperti pemerasan halus dan lain-lain yang belum ada penuntutnya didalam Undang-undang, pemidanaan dan penghukuman akan sia-sia hasilnya apabila penjahat yang selesai menjalankan masa pemidanaannya dikembalikan kepada masyarakat dimana kejahatan relatif tinggi,

Suatu proses kejahatan adalah lebih dari pada sikap psychology seorang individu. Apabila kita mengarah kepada rangkaian sosialnya maka kita akan dapat bekerja mengadakan prevensi kejahatan. Dengan kata lain bahwa pencegahan lebih baik dari pada penyembuhan.

2. Metode Prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.

Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu system ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dan FORKI Cab. Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh Penulis, karena dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan pengurus FORKI.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum,

karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan FORKI cab. Makassar. Yang dimana penulis akan melakukan wawancara kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan perkara yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Studi dokumentasi:

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengamati dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

D. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Yang Menyebabkan kematian atlet saat pertandingan karate.

Sebelum Penulis membahas tentang faktor-faktor penyebab kematian atlet pada saat kejuaraan, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan tentang bentuk pertandingan yang dipertandingkan.

Dalam kejuaraan Karate, ada dua bentuk yang dipertandingkan, yaitu peragaan jurus atau disebut *Kata* dan pertandingan perkelahian atau *Kumite*.

Dalam Penulisan ini, Penulis akan membahas tentang *kumite*, dimana dalam *kumite* inilah atlet rentan akan cedera dan bahkan terkadang berujung pada kematian atlet itu sendiri.

Kumite sering di tafsirkan sebagai (Dody Rudianto, 2010 :139) “pertemuan tangan”. Dalam *Kumite*, mengajarkan kepada para Karateka untuk mempraktikan teknik tarungan seperti menyerang, menangkis, menghindar, bertahan, membalas serangan, merupakan ekspresi perkelahian bebas yang beraturan dengan menjaga keamanan agar tidak cedera.

Hal di atas, merupakan uraian singkat tentang arti dari *Kumite*, selanjutnya Penulis akan menguraikan mengenai faktor dari kematian atlet saat kejuaraan karate.

Dalam kejuaraan Karate, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap elemen yang terkait, aturan-aturan tersebut merupakan mekanisme formal yang harus dilakukan, dan sangat penting. Jika tidak dilaksanakan maka salah satu akibatnya adalah atlet yang bertanding bisa kehilangan nyawanya sendiri.

Hal di atas di rumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang bunyinya sebagai berikut :

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

Terkait tentang keselamatan dan kesehatan olahragawan, diwajibkan kepada para penyelenggara agar menyediakan tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) UU No. 3 Tahun 2005, sebagai berikut ;

Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, data yang didapatkan terkait dengan Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

a. Aturan *Kumite*.

Kumite untuk putra dan putri dibagi atas : kumite perorangan dengan pembagian kelas berdasarkan berat badan dan kumite beregu tanpa pembagian kelas berat badan (khusus untuk putera). Sistem pertandingan yang dipakai adalah *refenchange* (WUKO) atau babak kesempatan kembali kepada atlet yang pernah

dikalahkan oleh sang juara. Pertandingan dilakukan dalam satu babak (2-3 menit bersih) dan 1 babak perpanjangan kalau terjadi seri (enchosen), sedangkan didalam pertandingan beregu tidak ada waktu perpanjangan. Dan jika masih pada babak perpanjangan masih mengalami nilai seri, maka akan diadakan pemilihan karateka yang paling ofensif dan agresif sebagai pemenang.

World Karate Federation (WKF) mulai tahun 2009, memberlakukan peraturan baru tentang ketentuan usia dan nomor pertandingan Karate, baik yang dilakukan sendiri oleh WKF maupun AKF, dan pertandingan karate pada Multy Even Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), melalui Surat Edaran Nomor 13/PB.FORKI – SEKJEN/SE/I/09 tertanggal, 15 Januari 2009. tentang Peraturan Baru Pertandingan Karate WKF. Yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Karate, dan Pimpinan Pengurus Provinsi Forki.

Adapun peraturan tersebut sebagai berikut:

❖ USIA :

- a) Usia kadet 14 & 15 tahun;
- b) Usia junior 16 & 17 tahun;
- c) Di bawah 21 tahun usia 18,19 & 20 tahun;
- d) Senior usia Kata + 16 tahun.

❖ Pertandingan KADET:

- a) kadet Kata perorangan putra & putri;

b) Kumite putra : – 52 kg, – 57 kg, – 63 kg, – 70 kg, dan + 70 kg;

c) Kumite kadet putri: – 47 kg, – 54 kg, dan + 54 kg.

❖ Pertandingan JUNIOR:

a) Junior kata perorangan & Kata beregu putra & putri;

b) Kumite putra – 55 kg, – 61 kg, – 68 kg, -76 kg, + 76 kg;

c) Kumite junior putri: – 48 kg, – 53 kg, – 59 kg, dan + 59 kg.

❖ Pertandingan dibawah usia 21 tahun:

a) Kumite putra – 68 kg, -78 kg, +78 kg;

b) Kumite putri – 53 kg, – 60 kg, dan + 60 kg.

❖ Untuk pertandingan senior:

a) Kata perorangan & beregu putra & putri;

b) Kumite putra – 60 kg, – 67 kg, – 75 kg, – 84 kg, dan + 84 kg;

c) Kumite putri terdiri dari – 50 kg, – 55 kg, – 61 kg, – 68 kg, dan + 68 kg.

Pada kategori Kadet pertandingan *Kumite* wajib menggunakan *Face Masker* dan *Body Protector*.

b. Durasi Pertandingan.

Waktu pertandingan *Kumite* untuk Kadet, Junior & Under 21 tahun durasinya dua menit (putra/putri). Waktu pertandingan *Kumite* senior meliputi: babak penyisihan durasinya tiga menit (3 menit) untuk putra dan dua menit (2 menit) untuk putri, pada babak

final memperebutkan juara I dan final repechage memperebutkan juara tiga durasinya empat menit untuk putra dan tiga menit untuk putri.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah ini :

1. Durasi dari pertandingan kumite adalah selama 3 (tiga) menit untuk kumite pria senior (baik perorangan atau beregu) dan 2 (dua) menit untuk wanita, junior, dan usia dini (cadet).
2. Pengatur waktu pertandingan dimulai ketika wasit memberi tanda untuk memulai dan berhenti setiap ia berseru *YAME*.
3. Pencatat waktu akan memberi tanda dengan/melalui bel yang bersuara sangat jelas atau dengan pluit, menandakan waktu sisa 30 detik atau waktu telah habis, tanda waktu tersebut merupakan akhir dari suatu partai pertandingan.

c. Lapangan.

Arena pertandingan untuk Melakukan Pertandingan harus rata dan terhindar dari kemungkinan menimbulkan bahaya. Pada Kumite Shiai (kumite pertandingan) yang biasa digunakan oleh FORKI yang mengacu peraturan dari WKF, idealnya adalah menggunakan matras dengan lebar 10 x 10 meter. Matras tersebut dibagi kedalam tiga warna yaitu putih, merah dan biru. Matras yang paling luar adalah batas jogai dimana karateka yang sedang bertanding tidak boleh menyentuh batas tersebut atau akan dikenakan pelanggaran. Batas yang kedua lebih dalam dari batas

jogai adalah batas peringatan, sehingga karateka yang sedang bertanding dapat memprediksi ruang arena dia bertanding. Sisa ruang lingkup matras yang paling dalam dan paling banyak dengan warna putih adalah arena bertanding efektif.

d. Peralatan dalam Pertandingan.

Peralatan Di Dalam Pertandingan Karate :

1. Karategi (pakaian) karate) untuk kontestan / peserta;
2. *Hand Protector* (pelindung tangan);
3. *Shin Guard* (Pelindung kaki);
4. *Obi* (ikat pinggang) untuk masing-masing kontestan / peserta yang berwarna merah (AKA) dan biru (AO);
5. Peralatan lain diperbolehkan tetapi tidak menjadi keharusan adalah:
 - a. *Gum Shield* (pelindung gigi); di beberapa pertandingan menjadi keharusan;
 - b. *Body Protector* (pelindung badan) untuk kontestan / peserta putri;
 - c. *Groin Protector* (pelindung kelamin) untuk kontestan / peserta pria;
 - d. Pluit untuk arbitrator (alat tulis);
 - e. Seragam wasit / juri;
 - f. Baju berwarna putih.
6. Lampu, berwarna merah, kuning, hijau sebagai tanda waktu pertandingan;

7. Stop Watch (pencatat waktu).
- e. Aturan Perwasitan.
1. Untuk Kategori Cadet ditambahkan perlengkapan pelindung, *Face Mask* dan *Body Protector*;
 2. Wasit tidak boleh memberikan score dengan mudah, harus mutlak memenuhi 6 kriteria score;
 3. Juri Kata ditetapkan 5 orang;
 4. Untuk kata beregu perebutan medali menggunakan Bunkai, pada saat melakukan Bunkai dilarang melempar di atas kepala;
 5. Melebih-lebihkan cidera diberikan hukuman langsung *Keikoku*, Lebih serius bisa langsung *hansoku chui* atau *hanshoku*. Wasit harus mampu membedakan antara melebih-lebihkan cidera karena memang ada cidera yang nyata dengan melebihkan cidera tapi sebenarnya tidak ada cidera ini disebut dengan pura-pura cidera dan hukumannya adalah *shikaku*;
 6. *Minei, reconsider* dihilangkan, apabila juri tidak yakin dengan score yang terjadi karena tidak melihat dengan jelas maka juri akan diam. Wasit akan menghentikan pertandingan, kemudian juri-juri menurunkan benderanya sampai wasit kembali keposisinya, kemudian wasit akan memberikan pendapatnya dan juri juga mengeluarkan kembali bendera, dan keputusan majority yang akan diambil tidak ada *reconsider*;
 7. Waktu pertandingan 3 menit untuk Senior putra, 2 menit senior putri, pada ronde perebutan medali, 4 menit untuk senior putra

- dan 3 menit untuk senior putri. Untuk Cadet, Junior dan Under 21 baik penyisihan maupun perebutan medali waktunya 2 menit;
8. *Enchosen* diganti dengan *Shai-Siai* waktu 1 menit penuh, point, hukuman yang terjadi di babak awal dihapuskan, apabila score sama atau tidak ada score maka diputuskan *Hantei*, (untuk memutuskan *hantei* kriteria *hatei* hanya dilihat pada 1 menit *Shai-siai*.);
 9. *Atoshibaraku* sebelumnya pada 30 detik terakhir diganti menjadi 10 detik terakhir;
 10. Merangkul lawan dibawah pinggul atau menarik kaki lawan merupakan pelanggaran yang termasuk kepada bantingan berbahaya dan yang melakukan akan dihukum Category 1;
 11. Semua teknik tangan kearah muka dan kepala untuk Cadet, Junior Tidak boleh menyentuh dan jaraknya 10 Cm, tendangan *Jodan Skin Touch*. Pukulan kemuka bagaimanapun ringannya langsung diberikan finalti (minimal *keikoku*) kecuali akibat kesalahan sendiri;
 12. Untuk Senior semua teknik tangan kearah muka adalah *skin touch*, dan jaraknya 5 cm , tendangan *Jodan Slight Touch*;
 13. Tingkatan Score :
 - a. Sanbon : Tendangan Jodan, dan menjatuhkan lawan atau lawan jatuh sendiri diikuti dengan score;
 - b. Nihon : Hanya tendangan Cudan (Cudan Geri);
 - c. Ipon : Pukulan dan Uchi (Punch and Strike).

14. Mubobi: terjadi apabila *No Contact no Mubobi*, hanya yang melakukan *mubobi* saja yang dihukum;
15. Kontenstan yang melakukan lemparan, bantingan dan menjatuhkan lawan, diberikan waktu 2 detik untuk melancarkan score;
16. Pelatih harus menyerahkan ID.CARD ke meja ADM pertandingan sebelum pertandingan dimulai, dan mendampingi atlit dengan sopan;
17. Celana wasit harus benar bewarna abu-abu muda.

Ketentuan-ketentuan yang dipaparkan Penulis di atas, merupakan ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan oleh PB-FORKI, wasit, penyelenggara dan seluruh elemen yang terkait dalam suatu kejuaraaan atau pertandingan, karena hal-hal tersebut di atas dapat menjadi faktor-faktor yang bisa mengakibatkan atlet yang sedang bertanding mengalami cedera dan bahkan mengalami kematian.

Misalnya durasi pertandingan dari satu babak ke babak lainnya, atau durasi jedah atau istirahat seorang atlet dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya, harus di patuhi, durasi yang di luar ketentuan dan memiliki jedah yang singkat, dapat menyebabkan kelelahan, stamina menurun dan akhirnya dapat mengakibatkan atlet tersebut meninggal dunia.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kematian Atlet Pada Saat Pertandingan Karate.

Perjalanan perkembangan Karate yang merupakan salah satu cabang keolahragaan nasional, Pemerintah berusaha meramu aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap atlet-atlet karate dan dunia keolahragaan.

Aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan keolahragaan yang saling terkait, undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak.

Dalam Pasal 1 ayat (27), dan ayat (28) UU No. 3 Tahun 2005, diatur tentang standar nasional keolahragaan, standar nasional kompetensi, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (27) ;

Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 1 ayat (28) ;

Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

Tentang standarisasi nasional keolahragaan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 81 UU No. 3 Tahun 2005, yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Standar nasional keolahragaan meliputi ;
- a. Standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. Standar sarana dan prasarana;
 - d. Standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. Standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. Standar pelayanan minimal keolahragaan.

Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2005, dijelaskan bahwa;

- Standar kompetensi tenaga keolahragaan mencakup persyaratan, antara lain, pendidikan dan kelayakan, baik fisik maupun mental serta penataran dan pelatihan yang telah diikuti.
- Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan mencakup persyaratan, antara lain, ruang lingkup materi, bahan, dan silabus penataran/pelatihan yang harus dikuasai oleh peserta, dan tingkat kompetensi yang dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan penataran/pelatihan.
- Standar sarana dan prasarana olahraga mencakup, antara lain, ruang dan tempat berolahraga serta perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga.
- Standar pengelolaan organisasi keolahragaan mencakup persyaratan, antara lain, tentang struktur dan personalia, rencana dan program kerja, jadwal pelatihan dan kompetensi kejuaraan yang diselenggarakan/diikuti, serta administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan.
- Standar penyelenggaraan keolahragaan mencakup, antara lain, struktur organisasi penyelenggaraan, rencana dan program kerja, satuan pembiayaan, jadwal kejuaraan, administrasi dan manajemen penyelenggaraan, serta keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- Standar pelayanan minimal keolahragaan mencakup persyaratan antara lain ruang berolahraga, tempat dan fasilitas olahraga, tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal yang dijelaskan Penulis di atas, merupakan aturan tentang standarisasi dalam dunia keolahragaan, dalam pasal-pasal berikutnya akan di jelaskan lebih jauh tentang upaya perlindungan hukum terhadap dunia keolahragaan, termasuk dunia olahraga karate.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa Karate merupakan bagian dari olahraga nasional, dimana dalam olahraga nasional dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi dan menanamkan jiwa sportivitas dan disiplin yang tinggi terhadap insan-insan olahraga, oleh karena itu dalam olahraga nasional, pemerintah mengatur tentang prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan olahraga yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2005, yang dirumuskan sebagai berikut ;

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. Pembudayaan dan keterbukaan;
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. Keselamatan dan keamanan;
- h. Keutuhan jasmani dan rohani.

Mengenai kata “tidak diskriminatif” dalam huruf a di atas dimaksudkan bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa.

Dalam penyelenggaraan olahraga, harus mencerminkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dimaksud tersebut diantaranya adalah kesopanan, budaya, akhlak mulia dan sportivitas. Selain itu, dalam pelaksanaan olahraga nasional, masyarakat haruslah diberdayakan, agar masyarakat berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan olahraga.

Selain hal di atas, pasal yang tak kalah pentingnya adalah mengenai penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana, yang masing-masing dimuat dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU No. 3 Tahun 2005

Pasal 88 merumuskan tentang ;

- (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan yurisdiksi.

Dalam hal alternatif penyelesaian sengketa, dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk ketentuan pidana, Pasal 89 UU No. 3 Tahun 2005 merumuskan sebagai berikut ;

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Jika melihat ketentuan pidana di atas, tidak ditemukan aturan yang tegas tentang bagaimana ketentuan hukumnya apabila pada saat

pertandingan ada atlet yang meninggal. Ketentuan yang paling mendekati hanyalah ditemukan pada Pasal 89 ayat (2) UU No.3 Tahun 2005. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap atlet dalam dunia keolahragaan nasional, maka diperlukan adanya pengawasan.

Mengenai pengawasan, UU tentang Keolahragaan Nasional merumuskannya dalam Pasal 87 UU No. 3 Tahun 2005 sebagai berikut ;

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tentang pengawasan, sebagaimana disebutkan di atas, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KEPRES RI No. 72 Tahun 2001), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1971 tentang Olahraga Profesional (PP RI No. 63 Tahun 1971).

Dalam KEPRES RI No. 72 Tahun 2001, dijelaskan bahwa satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga dan prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

KONI sebagai induk keolahragaan, mempunyai tugas-tugas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 KEPRES RI No. 72 Tahun 2001 sebagai berikut ;

Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas :

- a. Membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;
- b. Mengoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.

Sementara dalam PP RI No. 63 Tahun 1971 disebutkan bahwa penyelenggaraan dan pembinaan olahraga profesional dilakukan oleh pemerintah yang dibantu oleh Badan Pembina Olahraga Profesional Indonesia (BAPOPI).

Dalam Pasal 4 PP RI No. 63 Tahun 1971, BAPOPI adalah “Badan Pembantu Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”.

BAPOPI mempunyai tugas dalam bidang keolahragaan, tugas-tugas tersebut dimuat dalam Pasal 5 PP RI No. 63 Tahun 1971, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan saran-saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan dan menyempurnakan Olahraga Profesional Indonesia;
2. Mengawasi pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Olahraga Profesional;

3. Membantu usaha-usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembinaan olahraga profesional;
4. Memberikan bimbingan kepada mereka yang telah mengabdikan dirinya dalam Olahraga Profesional.

Hal-hal yang diuraikan Penulis di atas, merupakan gambaran tentang perlindungan hukum dalam dunia keolahragaan, terutama dalam dunia karate dan perlindungan hukum terhadap para atlet. Dan didasarkan pada UU tentang Keolahragaan Nasional.

Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, demi mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam perkembangan pertandingan karate, memang sering terjadi yang dinamakan human error, yaitu adanya kurang ketelitian (*ketika seorang peserta dipaksakan bertanding walaupun konsisinya sudah tidak memungkinkan untuk bertanding*), kurangnya perhatian terhadap peserta kegiatan oleh pelaksana kegiatan, pelatih, wasit dan unsur-unsur pendukung pelaksana kegiatan. Dalam hal ini kesiapan pihak penyelenggara, pelatih, wasit, dan lain-lainnya menjadi sorotan utama mengapa terjadi kematian pada atlet yang sedang bertanding. Dalam dunia Keolahragaan Nasional khususnya dalam pertandingan karate, ada beberapa aturan/prosedural yang harus dipenuhi, sebagaimana yang rumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang bunyinya sebagai berikut :

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

Jika aturan/prosedural tersebut tidak dijalankan maka dapat menjadi faktor yang mengancam keselamatan para atlet yang bertanding, bahkan dapat berujung pada kematian. Perjalanan perkembangan Karate yang merupakan salah satu cabang keolahragaan nasional, Pemerintah berusaha meramu aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap atlet-atlet karate dan dunia keolahragaan.

Aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan keolahragaan yang saling terkait, undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak.

Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, demi mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi

B. Saran.

1. Diharapkan agar dirumuskan aturan yang tegas tentang perlindungan hukum bagi atlet yang meninggal saat pertandingan, agar penanganan kasusnya bisa lebih jelas, akuntabel, dan keluarga korban bisa mendapatkan kepastian hukum.
2. Organisasi-organisasi keolahragaan yang bertugas melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan keolahragaan, harus benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab, agar pelaksanaan keolahragaan tidak melenceng dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah harus betul-betul memperhatikan Keolahragaan Nasional agar dapat lebih memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta meningkatkan prestasi para atlet tanpa adanya

politisasi, agar dapat mengangkat harkat dan martabat negara melalui bidang olahraga.

4. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga, karena sebagaimana realitas yang ada, bahwa banyak mantan atlet berprestasi, harus hidup melarat, bahkan ada yang menjadi pengemis dan gelandangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Farid, A.Z. Abidin dan Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Yasrif Watampone.
- Goodman, Fay. 1994. *Beladiri Untuk Semua Umur*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, L. 1986. *Kriminologi*. Bina aksara: Jakarta
- Moeljatno, L. 1970. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Madiun : Percetakan Minerva.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rudianto, Dody. 2010. *Seni Beladiri KARATE*. Jakarta : Golden Terayon Press
- Saheroji H. Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru: Jakarta.
- Sahetapy, J.E. dan Pohan Agustinus. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soedjono. 1970. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung : Alumni,.

Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor : Politeia

Weda, Made Dharma, 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Sumber Lain.

Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1971 tentang Olahraga Profesional.